

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kecurangan pada perusahaan publik telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk investor, auditor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya. Kekhawatiran tersebut muncul karena adanya dugaan bahwa pihak manajemen terlibat dalam praktik kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan tata kelola perusahaan, khususnya melalui karakteristik dewan komisaris dan mekanisme audit, dalam memitigasi potensi terjadinya *fraudulent financial statement*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *audit fee* dalam memoderasi pengaruh karakteristik anggota dewan komisaris terhadap *fraudulent financial statement*. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020–2023. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 124 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis data menggunakan regresi logistik dengan bantuan perangkat lunak E-Views 12 guna menguji hubungan antarvariabel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*. Sementara itu, keberagaman gender dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan lainnya mengungkapkan bahwa *audit fee* berperan sebagai variabel moderasi yang efektif dalam memperkuat hubungan antara independensi dewan komisaris dan frekuensi rapat dengan *fraudulent financial statement*. Namun, *audit fee* tidak mampu memoderasi hubungan ukuran dewan maupun keberagaman gender terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kata kunci : Kecurangan Laporan Keuangan, Independensi Dewan Komisaris, Frekuensi *Meeting*, Ukuran Dewan Komisaris, Keberagaman Gender, Biaya Audit.